



MODEL

**C**

# PEDOMAN

## MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH





MODEL

**C**

# **PEDOMAN**

# MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH



**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

**2022**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL C**

PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH  
MODEL C

**Pengarah**

E. Aminuddin Aziz  
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**Penanggung Jawab**

Imam Budi Utomo  
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

**Penyusun**

Nazarudin dan Tiar Simanjuntak

**Pembantu Penyusun**

Retno Handayani, Itmam Jalbi, dan Dian Palupi

**Penyelaras**

Ganjar Harimansyah dan Anita Astriawati Ningrum

**Pendesain dan Pengatak**

Nurjaman

Ukuran: 14x20 cm

**ISBN :**

No ISBN

**Cetakan Pertama :**

Juni 2022

**Hak Cipta ©2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

# **SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Indonesia merupakan negara kedua setelah Papua Nugini yang kaya dengan bahasa daerah. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah sesungguhnya merupakan aset. Ia merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang berbineka. Kelahiran bangsa Indonesia tidak terlepas dari keberagaman budaya yang ada di dalamnya, termasuk bahasa-bahasa setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat tutur yang lebih kecil.

Merawat dan memperlakukan aset takbenda seperti bahasa daerah tentu saja berbeda dengan cara melihat aset berupa benda. Bahasa daerah merekam kearifan lokal, khazanah pengetahuan dan kebudayaan, serta kekayaan batin penuturnya. Kepunahan bahasa daerah sama artinya dengan hilangnya aset-aset takbenda yang terekam di dalam bahasa daerah tersebut.

Lebih dari tiga perempat bahasa daerah terdapat di wilayah timur Indonesia, dengan jumlah penutur yang rata-rata sedikit. Akibatnya, ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah seperti ini menjadi sangat kuat. Situasinya akan makin parah kalau tidak ada keberpihakan dari penuturnya dan dari pemerintah daerah setempat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengembangan dan pelindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Paling sedikit, ada empat faktor penyebab kemunduran atau bahkan kepunahan bahasa daerah. Pertama, sikap penutur bahasa daerah terhadap bahasanya. Kedua, migrasi atau mobilitas sosial yang tinggi. Ketiga, adanya perkawinan dengan pasangan yang berbeda bahasa. Keempat, bencana atau musibah yang menyebabkan berkurangnya penutur bahasa daerah. Dari keempat faktor itu, sikap penutur bahasa kepada bahasa daerahnya menjadi penyumbang terkuat terhadap kepunahan sebuah bahasa daerah. Ketika para penutur bahasa daerah melihat bahasa daerahnya tidak lagi fungsional, kurang bergengsi, tidak keren, atau bahkan kampungan, keadaan dan cara pandang seperti itu menjadi pintu gerbang pertama bagi bahasa daerah untuk memasuki keranda matinya.

Telah banyak upaya pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Pemerintah pusat, melalui Badan Bahasa dan unit pelaksana teknisnya di 30 provinsi, banyak melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan setempat. Upaya itu bukan

tidak berhasil, melainkan belum optimal. Tampaknya, kekurangoptimalan itu terjadi karena perlindungan bahasa daerah belum dilandasi pemikiran yang komprehensif/ holistik dan integratif. Dikatakan tidak komprehensif karena hanya mengambil bagian kecil dari perlindungan bahasa, yaitu mendokumentasikan aspek kebahasaan dan mementaskan sastra lokal bersama masyarakat tutur.

Sehubungan dengan itu, inisiatif untuk mengubah arah dan praktik perlindungan bahasa daerah mulai digulirkan Badan Bahasa. Pelindungan bahasa yang awalnya lebih dipahami sebagai bentuk proteksi dibuat lebih dinamis melalui konsep revitalisasi. Upaya ini dilakukan sebagai cara menghidupkan kembali hasrat dan minat penutur bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya. Pendekatan revitalisasi ini dilakukan dengan model revitalisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah dan bahasanya. Bahkan, untuk memperkuat upaya ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-17 yang bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah pada Selasa, 22 Februari 2022. Peluncuran kebijakan ini bertepatan dengan momen Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari 2022. Revitalisasi yang diusung Kemendikbudristek ini merupakan pendekatan baru untuk revitalisasi bahasa daerah di Indonesia.

Untuk mendapat pemahaman lebih komprehensif perihal revitalisasi bahasa daerah, kehadiran buku *Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah* ini tentu sangat urgen. Sebagai pedoman, buku ini tidak hanya dipakai oleh para pihak di lingkungan Badan Bahasa, tetapi dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan di pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kehadiran pedoman ini tentu saja sangat berarti agar upaya revitalisasi bahasa daerah menjadi kerja bersama yang integratif dan berkelanjutan.

Kepala,

E. Aminudin Aziz

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA _____	v
--	---

DAFTAR ISI _____	vii
------------------	-----

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> _____	<b>1</b>
--------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang _____	1
--------------------------	---

1.2 Dasar Hukum _____	2
-----------------------	---

1.3 Tujuan _____	3
------------------	---

1.4 Sasaran _____	3
-------------------	---

1.5 Ruang Lingkup _____	3
-------------------------	---

1.6 Indikator Keberhasilan _____	4
----------------------------------	---

2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah _____	5
---	---

<b>BAB II KONSEP DASAR PELINDUNGAN</b>	
--	--

<b>BAHASA DAERAH</b> _____	<b>5</b>
----------------------------	----------

2. 2 Situasi Kebahasaan di Indonesia _____	14
--	----

2.2.1 Situasi Diglosik _____	17
------------------------------	----

2.2.2 Situasi Triglosik _____	17
-------------------------------	----

2.2.3 Dampak globalisasi pada situasi kebahasaan di Indonesia _____	18
---	----

2.2.4 Pelindungan bahasa-bahasa daerah _____	19
--	----

2. 3 Tantangan-Tantangan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah _____	20
---	----

2.4. Praktik Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Selama Ini _____	25
--	----

<b>BAB III PENDEKATAN BARU PELINDUNGAN</b>	
--	--

<b>BAHASA MODEL C</b> _____	<b>27</b>
-----------------------------	-----------

3. 1 Konsep Dasar _____	28
-------------------------	----

3. 2 Revitalisasi Berbasis Sekolah _____	32
--	----

3. 3 Revitalisasi Berbasis Komunitas _____	33
--	----

3. 4 Revitalisasi Berbasis Masyarakat (Keluarga/Individu) _____	34
---	----

3.5 Implementasi dan Pengendalian Mutu _____	35
--	----

3. 5. 1 Persiapan Revitalisasi _____	35
--------------------------------------	----

3. 5. 2 Pelatihan dan Pembekalan _____	36
--	----

3. 5. 3 Revitalisasi _____	37
----------------------------	----

3. 5. 4 Pelaporan Hasil _____	39
-------------------------------	----

<b>BAB IV PENUTUP</b> _____	<b>41</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RUJUKAN</b> _____	<b>42</b>
-----------------------------	-----------





## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang banyak memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Penentuan status suatu bahasa dan sastra dilakukan melalui kajian vitalitas. Setelah diketahui tingkat vitalitasnya, kita baru dapat menentukan sikap. Ada bahasa dan sastra yang masih dapat direvitalisasi karena masih mempunyai potensi untuk bertahan. Ada pula bahasa dan sastra yang hanya diperlukan konservasi, tetapi ada pula bahasa dan sastra yang dapat dikonservasi dan direvitalisasi sekaligus.

Konservasi dan revitalisasi tersebut merupakan suatu upaya perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak mengalami kepunahan. Upaya perlindungan bahasa dan sastra tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu dalam Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan cara pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, dan registrasi bahasa dan sastra.

Dari berbagai upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra memiliki peran penting, yaitu (1) menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap hidup; (2) mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur mempertahankannya; (3) membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah; (4) menemukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah; dan (5) menghadirkan generasi baru dari penutur bahasa dan sastra daerah.

Peran revitalisasi sebagai langkah perlindungan bahasa dan sastra daerah tersebut harus didukung oleh adanya pedoman revitalisasi bahasa

dan sastra. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perevitalisasi yang ada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai lembaga kebahasaan di Indonesia yang melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Dengan demikian, kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dapat berjalan optimal dengan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa dan sastra.

## 1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
11. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sesuai Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya.

### 1.3 Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan dan implementasi model revitalisasi bahasa daerah di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik bagi Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

### 1.4 Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah pelaksana revitalisasi bahasa dan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra meliputi (1) langkah kerja dan (2) tahapan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra.

## 1.6 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra mencakup

1. sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah daerah yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh adat pada saat festival/pertunjukan hasil revitalisasi bahasa dan sastra;
2. dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat dusun/desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota komitmen tentang perlindungan bahasa dan sastra di daerah tersebut;
3. dukungan perguruan tinggi selaras dengan implementasi program Merdeka Belajar khususnya program MBKM Revitalisasi Bahasa Daerah;
4. dukungan dinas pendidikan dan sekolah dalam implementasi program Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah (untuk revitalisasi berbasis sekolah); serta
5. hasil revitalisasi bahasa dan sastra teraktualisasi di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun komunitas tutur melalui nota kesepahaman.

## BAB II

# KONSEP DASAR PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

## 2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Kepunahan bahasa daerah dan sastra daerah, menjadi gejala global yang terjadi di berbagai negara. Bahkan menurut catatan UNESCO, hampir setiap pekan ada satu bahasa ibu yang hilang. Mengutip perkataan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof Endang Aminudin Aziz M.A., Ph.D. saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu (*Suara Merdeka*, 2021) bahwasanya “Di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Terbanyak kedua setelah Papua Nugini yang mempunyai 830 bahasa daerah. Pada 2019, tercatat ada 11 Bahasa Daerah di Indonesia yang dinyatakan punah. UNESCO mencatat, secara global, setiap pekan ada satu bahasa daerah hilang”.

Dalam pedoman ini, kami menggunakan istilah Bahasa Daerah, alih alih Bahasa Ibu. Merujuk pada catatan Bühmann & Trudell (2008), bahwa bahasa daerah didefinisikan sebagai *“Local language refers to the language spoken in the homes and marketplaces of a community, as distinguished from a regional, national or international language”*. Bahasa lokal mengacu pada bahasa yang digunakan di rumah dan pasar suatu komunitas, yang dibedakan dari bahasa regional, nasional, maupun internasional. Lebih lanjut, Bühmann & Trudell (2008) mendefinisikan, bahasa Ibu *“Mother tongue or mother language refers to a child’s first language, the language learned in the home from older family members”* “Bahasa ibu mengacu pada bahasa pertama seorang anak, bahasa yang dipelajari di rumah dari anggota keluarga yang lebih tua”. Dengan demikian, kami beranggapan bahwa dalam buku pedoman ini, penggunaan istilah “bahasa daerah” dianggap lebih cocok karena bersifat lebih umum. Di samping itu, penggunaan istilah “bahasa daerah” juga sejalan dengan peristilahan yang telah dipakai di dalam UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2009, serta PP No. 57 Tahun 2014.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) secara resmi mengatakan hampir 2.500 bahasa di seluruh dunia di ambang kepunahan. Hal itu diungkapkan oleh Ocal Oguz, ketua Komisi Nasional Turki untuk UNESCO. “Di antaranya, hampir 2.500 bahasa menghadapi kepunahan karena jumlah penuturnya sangat sedikit,” kata Oguz, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Anadolu Agency, Senin, 22 Februari 2021. “Sayangnya, menurut statistik dan data yang dikumpulkan, salah satu bahasa ini menghilang setiap 15 hari.” Oguz mengatakan bahaya bahasa dan menghilang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir karena perubahan sosial, politik dan ekonomi di dunia. Ia menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan oleh kurang dari 10.000 orang di dunia sebagian besar terancam punah.

Menurut catatan Grimes (1988), sebagaimana yang disebutkan dalam *Ethnologue: Languages of the World* (selanjutnya disebut *Ethnologue*, terdapat 6.809 bahasa di dunia. Dari jumlah tersebut 330 bahasa memiliki penutur sebanyak satu juta orang atau lebih. Jumlah penutur yang besar ini kontras (secara mencolok) dengan kira-kira 450 bahasa di dunia yang memiliki jumlah penutur yang sangat kecil, sudah berusia tua dan condong bergerak menuju ke kepunahan. Pada saat yang sama, jumlah rerata penutur bahasa-bahasa di dunia hanya berkisar 6.000 orang atau lebih, hanya separuhnya memiliki penutur 6.000 orang atau lebih penutur, dan hanya separuhnya lagi memiliki penutur kurang dari 6.000 orang.

Sementara itu, menurut UNESCO bahasa harus digunakan oleh minimal 10.000 orang untuk memastikan pertukaran antargenerasi. UNESCO juga memprediksi terdapat lebih dari setengah bahasa yang ada akan punah pada akhir abad ini. Sejak tahun 1951, UNESCO telah merekomendasikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Hal itu merupakan langkah konkret pemertahanan dan pemberdayaan bahasa ibu. UNESCO telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bahasa ibu untuk terus diperingati dalam pengertian dipertahankan pemakaiannya dan diberdayakan fungsinya (Ibda, 2017).

Sebagai etnis yang multikultur, bangsa Indonesia merupakan himpunan berbagai jenis masyarakat yang berbeda ragam sifat karakter dan adat budayanya (Purwaningsih, 2012). Salah satu bukti dari pernyataan tersebut ialah Indonesia sangat kaya dengan bahasa dan sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, tetapi di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Pada sekelompok masyarakat, bahasa daerah merupakan bahasa ibu,

sementara bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi bangsa Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Berlianty dan Balik (2018) dalam *Ethnologue* disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari sebagian besar bahasa itu akan punah. Di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat sekitar 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Fakta kepunahan bahasa seperti dalam paparan tersebut, ternyata menyebar di hampir seantero bumi (Ibrahim, 2011). Ada beberapa hal menarik yang dapat dicatat. *Pertama*, bahasa-bahasa yang terancam punah itu sebagian besarnya berada di daerah atau wilayah atau negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. *Kedua*, beberapa di antaranya memiliki total populasi etnik yang tidak lebih dari 5.000 orang. Jadi, bahasa-bahasa ini sesungguhnya telah terancam punah diantara begitu banyak total populasinya. *Ketiga*, sebagian besar dari bahasa-bahasa yang terancam punah itu merupakan etnik minoritas terisolasi atau minoritas yang berada dalam wilayah yang begitu beragam bahasa dan budayanya. *Keempat*, bahasa-bahasa yang terancam punah itu, sebagian besarnya tidak merupakan bahasa yang sehari-hari diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah. *Kelima*, fakta-fakta mengenai kepunahan bahasa-bahasa itu sebagian besarnya berasal dari wilayah multibahasa yang memilih sebuah bahasa lingua-franca dalam komunikasi lintas etnis.

Dalam konteks seperti ini, bila kebijakan politik bahasa nasional di satu sisi sebagai kebijakan kebahasaan yang mempersatukan keragaman dalam konteks pengelolaan negara dan nasionalisme yang tidak disertai dengan kebijakan preservasi bahasa-bahasa lokal, kebijakan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa nasional justru akan meminggirkan bahasa-bahasa lokal. Padahal, bahasa-bahasa lokal merupakan ‘wadah kebudayaan lokal’ sebagai pilar penting terbentuknya negara-bangsa. Karena itu, kepunahan bahasa-bahasa lokal dalam sebuah masyarakat multilingual dan negaranya mengambil kebijakan penggunaan bahasa nasional sebagai lingua-franca. Karena itu, perlu ada program-program penguatan bahasa lokal secara lebih terencana agar terhindar dari ancaman kepunahan.

Bahasa daerah tersebut memiliki beberapa fungsi yang sangat besar dalam masyarakat di suatu daerah, yakni sebagai bahasa lokal dalam satu suku, sebagai Bahasa dalam adat istiadat di daerah, sebagai kekayaan budaya daerah (Afria, 2017). Bahasa daerah merupakan warisan budaya tak benda, khususnya warisan berharga dari tradisi dan ekspresi lisan masyarakat tuturnya. Bahasa daerah tidak hanya tercermin dari aktivitas komunikasi sehari-hari, tetapi juga didapatkan di dalam manuskrip atau naskah kuno, puisi, legenda, peribahasa, maupun cerita rakyat. Seandainya banyak kosakata bahasa daerah yang hilang, akan merugikan pemahaman masyarakat penutur terhadap berbagai macam bentuk kata yang dikandung oleh alam semesta. Karena itu, sangatlah penting adanya penyelamatan dan perlindungan bahasa (kosakata kuno) sebagai bentuk kepedulian dengan bahasa sendiri.

Dari sudut pandang daya hidupnya, bahasa tipe pertama adalah bahasa yang diprediksi masih panjang usia hidupnya, sedangkan bahasa tipe kedua dan ketiga, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan mengalami kepunahan. Dalam kaitannya dengan daya hidup bahasa-bahasa di dunia, Michel Krauss (1992: 4-10) mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia ke dalam tiga tipologi: (1) bahasa-bahasa yang punah (*moribund languages*), (2) bahasa-bahasa yang terancam punah (*endangered languages*), dan (3) bahasa-bahasa yang masih aman (*safe languages*). Bahasa-bahasa yang dikategorikan *moribund*, menurut Krauss, adalah bahasa yang tidak lagi digunakan dipelajari (atau diperoleh) oleh anak-anak sebagai bahasa ibunya (*mother tongue, mother language*); bahasa-bahasa yang *endangered* adalah bahasa-bahasa yang meskipun sekarang masih dipelajari (atau diperoleh) oleh anak-anak, akan ditinggalkan anak-anak pada abad akan datang; sementara bahasa-bahasa yang *safe* adalah bahasa-bahasa yang mendapat sokongan kuat dari pemerintah dan memiliki sejumlah besar penutur.

Fenomena krisis jumlah penutur bahasa merupakan sebuah keadaan yang saat ini mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak. Krisis jumlah penutur sebagai tanda-tanda kepunahan (sebuah) bahasa adalah krisis menyedihkan dan menakutkan sebab fakta ini menyodorkan kepada kita lanskap mengenai punahnya sebuah peradaban melalui kepunahan bahasa (Ibrahim, 2011). Krisis jumlah penutur ini merupakan tanda yang nyata mengenai pengabaian oleh penutur terhadap bahasanya sendiri. Krisis ini juga merupakan tanda bahwa kemampuan bertahan hidup penutur bahasa minoritas sangat lemah atas banyak faktor.

Beberapa gejala berikut merupakan beberapa gejala kepunahan bahasa pada masa depan adalah (1) penurunan secara drastis jumlah penutur aktif, (2) semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa, (3) pengabaian atau pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda, (4) usaha merawat

identitas etnik tanpa menggunakan bahasa ibu, (5) penutur generasi terakhir tak cakap lagi menggunakan bahasa ibu (penguasaan pasif, *understanding without speaking*), dan (6) contoh-contoh mengenai semakin punahnya dialek-dialek satu bahasa, keterancaman bahasa Kreol dan bahasa sandi (Grimes 2000).

Dalam buku *“The Routledge Handbook of Language Revitalization”* yang dirensensi oleh Nazarudin (2021) disebutkan ada beberapa riset global yang menyatakan bahwa kepunahan bahasa ini banyak pula diawali dengan fenomena pergeseran bahasa. Pada beberapa riset dinyatakan bahwa pergeseran bahasa terkadang dianggap sebagai “pilihan penutur” sehingga dapat pula dipertanyakan seberapa “bebas” pilihan itu. Atau mungkin, pilihan itu terkait erat dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, misalnya antara kelompok bahasa dominan dan minoritas. Pada beberapa kasus, punahnya sebuah bahasa juga merupakan akibat dari faktor sejarah, seperti kolonisasi, yang merusak kelompok minoritas dan kelompok yang termarginalkan, yang kemudian terpaksa harus pergi dari tanah mereka sendiri. Bahkan di era pos-kolonial sekarang ini, pertumbuhan ekonomi dunia dan globalisasi terus menggerus penutur bahasa minoritas. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa-bahasa lokal yang terus bergeser sampai ke ranah budaya.

Selain penyebab di atas, beberapa penyebab lain sebuah bahasa dapat terancam keberadaannya disebutkan oleh Schmidt (2008) yaitu sebagai berikut.

a) Status Hukum Suatu Bahasa dan Institusi

Fakta bahwa suatu bahasa dapat diakui sebagai bahasa minoritas (bahasa daerah), pertama-tama mempengaruhi penyebarannya dan penggunaannya di antara masyarakat, tetapi juga meningkatkan prestisenya. Akan tetapi, jika status suatu bahasa tidak sesuai dengan status atau fungsinya secara dalam masyarakat, hal itu sebenarnya dapat menunjukkan bahwa hak-hak penuturnya sedang dilanggar. Dengan demikian mereka mungkin merasakan tekanan untuk beralih ke bahasa mayoritas agar tidak dikucilkan dari kehidupan publik.

b) Nilai Simbolis Suatu Bahasa

Ini terutama tercermin dalam sikap bahasa dan dapat mengubah bahasa menjadi varietas yang bergensi secara sosial atau terstigma. Bahasa minoritas sangat sering dianggap sebagai bahasa yang membawa tradisi dan karena bersifat folkloristik dan ketinggalan zaman, sedangkan bahasa yang dominan mencerminkan modernitas. Dalam kasus kehilangan bahasa, minoritas mungkin masih menganggap bahasa aslinya sebagai nilai kunci.

c) Fungsionalitas yang Terbatas atau Lemah

Aspek bahasa minoritas atau bahasa daerah sering menjadi alasan mengapa penuturnya sendiri beralih ke bahasa mayoritas. Mereka merasa bahwa bahasa ibu mereka tidak mengikuti perkembangan modern. Dalam konteks itu bahasa minoritas diperlakukan ‘hanya’ sebagai penanda identitas budaya etno belaka, dengan nilai yang lebih sentimental daripada instrumental. Namun, filosofi “bahasa asli - identitas” tidak memperhitungkan kelompok yang tidak menggunakan bahasa “warisan” sebagai penanda identitas.

d) Faktor Demografi

Faktor ini mencakup sebagian besar aspek statistik, terutama untuk beberapa hal, contohnya jumlah individu dalam suatu kelompok, perilaku reproduksi mereka, jumlah perkawinan campuran, imigrasi, dan emigrasi, mobilitas sosial. Juga teritorialitas kelompok dan konsentrasinya di wilayah yang sama, dan proporsi kelompok terhadap kelompok lain berdampak pada sikap bahasa, keberlanjutan atau kehilangan bahasa.

e) Faktor Partisipatif-Peluang Ekonomi dan Sosial

Tidak ada keraguan bahwa dalam masyarakat multietnis, peluang partisipasi lebih tinggi bagi orang-orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Dengan demikian, kapasitas dwibahasa menduduki peringkat tertinggi di pasar tenaga kerja, sedangkan pengetahuan tentang bahasa minoritas saja biasanya dianggap tidak mencukupi.

Ibrahim (2011) mengemukakan bahwasanya terdapat tiga sebab utama kepunahan bahasa, yaitu (a) karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak serta tidak lagi menggunakannya di rumah, (b) pilihan sebagian masyarakat tutur untuk tidak menggunakannya dalam ranah komunikasi sehari-hari, dan (c) tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat tutur multilingual. Berdasarkan sebab-sebab tersebut, sebab pertama dan kedua dinilai memiliki keterkaitan dengan sikap dan pemertahanan bahasa (*language maintenance*) masyarakat tuturnya. Jika pilihan untuk tidak menggunakan dan kebiasaan orang tua untuk tidak mewariskan bahasa ibu kepada anak-anaknya lemah, gerak menuju kepunahan akan lebih cepat lagi. Sebaliknya, bahasa-bahasa yang penuturnya memiliki pemertahanan bahasa yang kuat, memiliki vitalitas hidup kuat pula. Sementara itu, sebab ketiga terkait dengan dominasi komunikasi dalam mobilitas sosial-ekonomi serta penguasaan sumber-sumber kekuasaan kelompok mayoritas pemilik bahasa mayoritas yang mau tidak mau harus dihadapi oleh semua penutur, terutama penutur bahasa minoritas. Kelompok pemilik bahasa mayoritas yang karena penguasaan

atas sumber-sumber kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, dan kekuasaan secara politis, "memaksa" kelompok penutur bahasa minoritas mau tidak mau harus melakukan mobilitas vertikal dalam kerangka melakukan penyesuaian sosial agar menjadi bagian penting dalam proses kemajuan masyarakatnya. Mekanisme penyesuaian ini tidak hanya membuat penutur bahasa minoritas meninggalkan wilayah teritori tradisionalnya, tetapi juga "meninggalkan" bahasa ibunya kemudian semakin menggunakan sebuah bahasa mayoritas. Mekanisme ini secara lambat-laun turut memberi dampak pada dua hal terkait dengan penggunaan bahasa ibunya. Pertama, semakin berkurang jumlah penutur bahasa ibu kelompok minoritas dan kedua semakin menyempit pula ranah-ranah penggunaan bahasa ibu. Pada titik nadir, bahasa ibu hanya tinggal digunakan dalam percakapan yang bersifat rahasia, dan itu berarti bahasa ibu sesungguhnya telah mati.

Diterangkan lebih lanjut, hilangnya daya hidup bahasa daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahnya orang desa ke kota untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antar etnis yang banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis atau multilingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional. Pada umumnya, bahasa etnis setiap orang tua akan ditinggalkan dan bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan mereka secara adil. Kepunahan bahasa-bahasa daerah merupakan fenomena yang perlu dicermati dan disikapi secara serius dan bijaksana. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kepunahan bahasa sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar yaitu faktor alamiah dan faktor non-alamiah. Faktor alamiah yang tidak dapat dihindari kejadiannya dapat berupa bencana alam (*natural disaster*), pengaruh bahasa mayoritas, komunitas bahasa yang bilingual atau multilingual, pengaruh globalisasi, migrasi (*migration*), perkawinan antaretnik (*intermarriage*). Sementara itu, kurangnya penghargaan terhadap bahasa daerah, kurangnya intensitas pemakaian bahasa daerah, pengaruh faktor ekonomi, dan pengaruh pemakaian bahasa Indonesia merupakan faktor-faktor penyebab yang bersifat non-alamiah. Selain itu, sejumlah besar bahasa hanya memiliki bentuk lisan dan tidak ada tata cara penulisan yang benar (Tondo, 2009).

Salah satu sifat bahasa adalah dinamis (berubah-ubah) sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial berbahasa penutur. Misalnya, kosakata sebuah bahasa yang digunakan mengalami perubahan dan pembaharuan karena kosakata yang lama jarang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya percaya diri masyarakat dalam menggunakan bahasanya, dipengaruhi oleh modernisasi, faktor sosial dengan memandang

bahasa daerah merupakan bahasa yang dipakai oleh golongan bawah, petani, pedagang, atau buruh. Namun, dalam segi keilmiahan bahasa tidak memandang bahwasanya ada tingkatan-tingkatan bahasa (prestise atau tidak) (Afria, 2017).

Dalam masyarakat majemuk, tiap orang memiliki karakter dan cara berbahasa yang berbeda. Penguasaan bahasa pada anak juga dipengaruhi keluarga, lingkungan setempat, dan teknologi. Dalam psikolinguistik, ada tiga hal mendasar dalam bahasa, yaitu (1) pemahaman bahasa; (2) pemerolehan bahasa dan (3) produksi bahasa (Sudipa, 2009:1). Namun, yang sangat penting di era milenial sekarang adalah “pemertahanan bahasa” untuk menjaga kekayaan dan identitas bangsa (Ibda, 2017).

Vitalitas bahasa secara keseluruhan terkait dengan kombinasi antara faktor sosial, politik, demografis, dan praktis. Tanpa disadari pun, keseluruhan faktor tersebut biasanya berperan sekaligus. Salah satu contoh relevansi terbesar adalah faktor sosial dan politik, yaitu praktik penggunaan bahasa dalam berbagai domain, termasuk rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintah, di jalan-jalan, di toko-toko, di tempat kerja. Ketersediaan bahasa sasaran dalam berbagai ranah tersebut tidak selalu merupakan keputusan individu penutur, tetapi seringkali ditentukan oleh kebijakan bahasa dan pendidikan (Grenoble, 2021). Hal ini terkait dengan prestise sosial suatu bahasa, yang pada gilirannya terkait dengan motivasi penutur untuk menggunakan bahasa tersebut, dan juga terkait dengan kekuatan ekonomi suatu bahasa, apakah masyarakat yang mengetahui bahasa tersebut bisa memandangnya sebagai peluang atau justru menghalangi mereka?

Hal itu menjadi urgen karena saat ini kondisi bahasa anak saat ini sangat kacau dan rusak. Padahal kerusakan bahasa menjadi salah satu tanda kehancuran suatu bangsa. Lickona (1991) menjelaskan ada 10 tanda kehancuran suatu bangsa, yaitu *violence and vandalism, stealing, cheating, disrespect for authority, peer cruelty, bigotry, bad language, sexual precocity and abuse, increasing self centeredness and declining civic responsibility, self destructive behavior*. Pendapat Thomas Lickona tersebut ditafsirkan Martianto (2002) menjadi pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar. Kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata buruk. Ketiga, pengaruh group kecil yang kuat dalam tindak kekerasan. Keempat, meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba dan seks bebas). Kelima, semakin kaburnya pedoman baik dan buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. Ketujuh, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kedelapan, rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara. Kesembilan, membudayanya ketidakjujuran. Kesepuluh, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Salah satu poin penting dari sepuluh kerusakan menurut Thomas Lickona (1991) itu adalah *bad language* atau penggunaan bahasa dan kata-kata buruk. Bisa disimpulkan, kerusakan bahasa menjadi hal mendesak yang harus dibenahi karena menjadi indikator kehancuran suatu bangsa. Kerusakan itu akan semakin parah jika mendera di kalangan anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Anak-anak sebagai pelajar di daerah pedesaan saat ini tidak jauh berbeda dengan di kota-kota. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa yang “*semrawut*” dan tidak bisa membedakan, mana bahasa sendiri dan mana yang impor, mana bahasa asli dan mana yang asing. Pengaruh teknologi dengan adanya gawai, internet, media sosial (medsos) juga membuat anak-anak semakin kacau dalam berbahasa. Penggunaan bahasa lisan dan tulisan yang rusak justru menggeser bahasa ibu sebagai bahasa pertama. Banyak sekali bahasa ibu yang terdiri atas bahasa daerah/ lokal dan Bahasa Indonesia rusak dan digantikan bahasa lain yang arbitrer (mana suka) dan bahasa slang (tidak baku/musiman).

Berikut ini adalah contoh bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak muda (remaja) yang disebut bahasa gaul dengan berbagai proses pembentukannya yang unik. Mengadopsi berbagai bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa asing kemudian disesuaikan dengan lafal anak muda atau bahkan pengucapannya dibalik. Sebagai contoh kata *slow* dibaca sesuai lafal masyarakat Indonesia *selow* dan menjadi bahasa gaul (anak muda) *woles* karena dibaca dari kiri ke kanan. Bunyi sangat berperan dalam pembentukan bahasa gaul. Bahasa gaul *cins me apa* jika direkonstruksi berasal dari “Serius, demi apa?” yang pelafalannya sesuai dengan lafal anak-anak (Sartini, 2014). Hal semacam ini sangat sering dijumpai di Indonesia. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi konsistensi bahasa, khususnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal bahasa, baik bahasa ibu, bahasa daerah, maupun bahasa nasional tentu harus diselaraskan dengan berbagai upaya perlindungan bahasa. Salah satu bentuk upaya yang perlu diketahui, diresapi, dan diaplikasikan dalam kehidupan berbahasa masyarakat pada umumnya yang dikenal sebagai upaya revitalisasi bahasa (Sartini, 2014; Hinton, Huss, & Roche, 2018). Dalam konteks kebahasaan atau linguistik, revitalisasi berarti menghidupkan kembali atau memberikan vitalitas atau energi baru (dalam hal ini pada bidang bahasa) sehingga dapat kembali pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebagai acuan berbahasa yang benar. Kekacauan bahasa yang terjadi dalam bahasa dan sikap acuh tak acuh terhadap bahasa menyebabkan terpuruknya sebuah bahasa yang telah diperjuangkan dengan proses yang sangat panjang. Apa yang telah menjadi simbol negara tersebut seakan-akan tidak pernah mendapat perhatian dan

penghargaan. Perkembangannya yang “liar” tanpa kendali akan menjadikan bahasa yang ‘bebas’ tanpa prosedur penyerapan yang benar.

Untuk menghidupkan kembali dan menguatkan kembali bahasa-bahasa yang terancam punah, tergerus, dan stabil tetapi terancam, diperlukan tindakan-tindakan penyelamatan seperti (1) penyusunan tata bahasa pedagogik dalam cetakan dan cakram rekaman, (2) kamus, (3) surat kabar, (4) kelas bahasa bagi anak dan remaja di kampung sendiri, (5) sekolah bahasa untuk anak berbasis masyarakat, (6) gerakan penggunaan bahasa ibu di rumah, dan (7) bertutur bahasa ibu dalam acara adat. Tentu saja teknik-teknik perawatan ini memerlukan tahap-tahap pelaksanaannya, mulai dari survei mengenai kelayakan program, penyusunan silabus, uji coba, dan pelaksanaan yang sesungguhnya (Ibrahim, 2011).

Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi dan pendidikan, tetapi juga penyimpanan identitas, budaya, sejarah, tradisi, dan ingatan masyarakat. Bahasa dan budaya tersebut menghimpun kekayaan dan keragaman peradaban manusia. UNESCO telah mempromosikan keanekaragaman bahasa dan budaya sebagai faktor kunci untuk perdamaian dan pembangunan besar yang berkelanjutan. Ada lima prioritas yang menjadi faktor keberhasilan revitalisasi bahasa daerah, yaitu dukungan masyarakat, dukungan akademis, dukungan finansial, dukungan psikologis, dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian apabila bahasa daerah dalam kondisi kritis maka bersama bahasa daerah itu budaya daerah dan sistem pengetahuan leluhur ikut terancam punah. Karena itu, perlu perlindungan dan pelestarian bahasa yang menjamin hak masyarakat untuk melestarikan, merevitalisasi, dan mempromosikan bahasa daerah serta mengarusutamakan keragaman bahasa dan multibahasa ke dalam pembangunan berkelanjutan seiring perkembangan zaman. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penggunaan, pelestarian bahasa daerah dengan harapan para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang mereka sukai.

## **2. 2 Situasi Kebahasaan di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara kedua di dunia yang memiliki paling banyak keanekaragaman bahasa setelah Papua Nugini (Evans, 2009). Steinhauer (1994) memberikan estimasi bahwa sepersepuluh dari bahasa-bahasa di dunia dapat dijumpai di bumi Indonesia. Ethnologue (2020)

mencatat setidaknya ada 719 bahasa di Nusantara; 706 diantaranya masih digunakan secara aktif, sedangkan 13 lainnya dianggap sudah punah. Dari 706 bahasa yang masih dituturkan, ada 75 yang berada dalam status hampir punah. Sementara itu, Badan Bahasa menyampaikan hasil kajiannya bahwa hingga Oktober 2019, di Indonesia terdapat 718 bahasa. Jumlah tersebut diambil dari total 2.560 bahasa daerah sebagai percontohan dari semua provinsi di seluruh Indonesia.



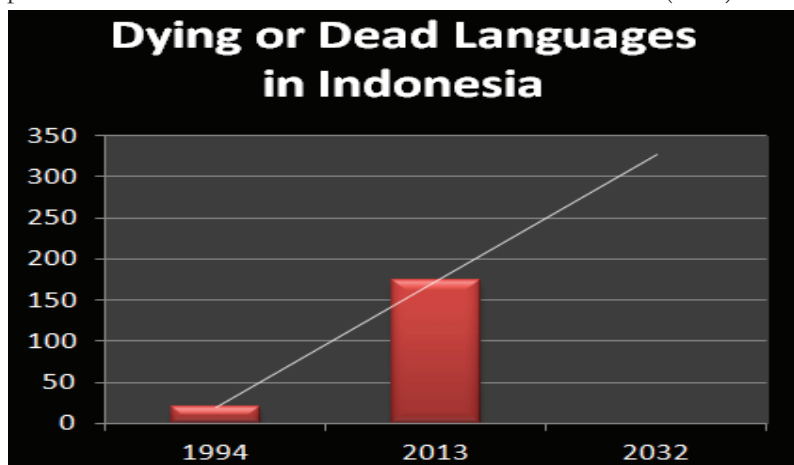
Gambar 1. Peta bahasa-bahasa di Indonesia (Badan Bahasa, 2019)

Data Ethnologue juga menyebutkan bahwa di Indonesia ada sepuluh bahasa daerah yang penuturnya paling banyak, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minang, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi (Ethnologue, 2020). Dari sepuluh bahasa tersebut, yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Jawa dan Sunda (Riza, 2008).

Steinhauer (1994) dalam catatannya mengatakan dari 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, antara 500 hingga 1.000 bahasa hanya diucapkan oleh segelintir orang. Selain itu, setiap tahunnya dunia kehilangan sekitar 25 bahasa ibu. Itu sama saja dengan kehilangan 250 bahasa selama satu dekade. Ini sebuah prospek yang menyedihkan bagi sebagian orang, sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul “The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and possibilities” (dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 150 Volumes of Bijdragen; A Backward Glimpse and a Forward Glimpse 150 (1994), No. 4, 755-784).

Pandangan lain terkait dengan situasi kebahasaan di dunia dan Indonesia dikemukakan oleh Koichiro Matsuura, direktur UNESCO, seperti dikutip Antara News.com pada Selasa, 20 Februari 2009, yang mengatakan bahwa kurang lebih 2.500 bahasa di dunia, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terancam punah dan hampir punah. Indonesia, India, AS, Brasil, dan Meksiko termasuk negara dengan keragaman bahasa lokal, yang saat ini sedang menghadapi ancaman terbesar kepunahan banyak bahasa. Matsuura menyebutkan bahwa kepunahan bahasa tertentu akan menyebabkan punahnya berbagai bentuk warisan budaya, terutama tradisi dan ekspresi lisan pembicaranya, yang meliputi puisi dan cerita rakyat, serta peribahasa dan anekdot. (The codification of native Papuan languages. *Journal of Arts and Humanities* (JAH) Warami et al., JAH (2020), Vol. 09, No. 10: 40-48).

Terdapat sekitar 178 bahasa lokal di Indonesia, yang saat ini berstatus terancam punah atau mengalami penurunan status. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain adalah adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang penyebabnya terkait dengan faktor ekonomi, bencana alam, pendidikan, atau karier. Selain itu, faktor politik yang terfokus ke pusat (atau yang disebut sebagai sentralisasi) menyebabkan wilayah pinggiran, atau yang lokasinya jauh dari pusat kota, menjadi tertinggal khususnya terkait dengan informasi. Yang terakhir adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa ranah pendidikan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau media untuk berinteraksi. Dengan adanya tiga faktor tersebut, di masa depan bahasa daerah akan menghadapi ancaman serius dari kepunahan bahasa. Berikut adalah gambaran akan kepunahan bahasa daerah di Indonesia menurut Anderbeck (2013).



Garis tren kepunahan bahasa daerah di Indonesia (Anderbeck, 2013:15)

## 2.2.1 Situasi Diglosik

Gambaran mengenai situasi kebahasaan di Indonesia sangat kompleks, sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan dwibahasawan (bilingual), dan sebagian lainnya adalah masyarakat anekabahasawan (multilingual). Dalam kasus dwibahasawan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, pada umumnya masyarakat perkotaan menguasai dua bahasa. Sebagai contoh, di wilayah Sumatra Barat, misalnya di Kota Padang, bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia memiliki peran dan kedudukannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Dalam situasi formal pada ranah pemerintahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sementara dalam situasi santai dan tidak formal, seperti di ruang-ruang umum terbuka, pasar dan pertemanan yang pada umumnya digunakan bahasa Minangkabau sebagai media komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Fenomena demikian dalam linguistik disebut sebagai masyarakat dwibahasawan dengan diglosia.

Ibrahim & Mayani (2018) menyebut ragam formal dengan varietas T (tinggi), sedangkan ragam informal dengan varietas R (rendah). Di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, situasi diglosiknya berbeda dari situasi diglosik di daerah. Pada umumnya, kaum muda yang tinggal di Jakarta menggunakan dua varian bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia ragam formal dan bahasa Indonesia ragam kolokuiyal (Sneddon, 2003). Ragam informal atau kolokuiyal yang digunakan di ibukota dianggap lebih ‘bergengsi’ atau ‘berkelas’ dan karenanya banyak ditiru oleh anak-anak muda dari luar kota Jakarta. Situasi diglosik di DKI Jakarta digambarkan sebagai berikut oleh Ibrahim & Mayani (2018, hlm. 110).

## 2.2.2 Situasi Triglosik

Situasi kebahasaan di Indonesia juga dapat bersifat triglosik. Di Kalimantan Tengah, misalnya, orang-orang Dayak merupakan masyarakat anekabahasawan. Sebagian besar orang Dayak Ngaju menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari dalam interaksi tidak resmi seperti di ranah jual beli, sementara pada lingkup keluarga mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun di ranah pemerintahan atau ranah lainnya yang bersifat resmi, penutur Dayak Ngaju menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaan fungsi-fungsi bahasa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam kajian sosiolinguistik disebut sebagai *masyarakat triglosik atau triglosia*. Berikut gambaran masyarakat tutur dengan triglosia pada kasus Kalimantan Tengah.

Situasi triglosik digambarkan oleh Ibrahim & Mayani (2018) dengan satu bahasa yang merupakan varietas T (ragam formal) dan dua bahasa lainnya yang merupakan varietas R (ragam informal). Ilustrasinya sebagai berikut.

Pada situasi triglosik tersebut di atas, bahasa Melayu Tempatan dan bahasa etnik (bahasa daerah setempat) berfungsi sebagai *lingua franca* (Ravindranath & Cohn, 2014; Arka, 2013). Bahasa Melayu Tempatan adalah nama umum untuk Bahasa Melayu yang digunakan sesuai dengan nama daerahnya. Misalnya, Melayu Papua dituturkan di daerah Papua, Melayu Jambi digunakan oleh penutur dari Jambi, Melayu Ambon oleh penutur dari Ambon, dsb (Arka, 2013). Sebagai contoh, orang Papua yang tinggal di Manokwari menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah formal. Bahasa Melayu Papua mereka gunakan sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa etnik (misalnya bahasa Dani, bahasa Amber, dll) digunakan bila mereka berinteraksi dengan orang yang berbicara dalam bahasa daerah yang sama.

### 2.2.3 Dampak globalisasi pada situasi kebahasaan di Indonesia

Eksistensi sebuah bahasa sangat tergantung pada kekuatan bahasa tersebut. Hingga saat ini, bahasa yang menduduki peringkat tertinggi sebagai *lingua franca* di dunia adalah bahasa Inggris. Seperti yang disampaikan oleh Crystal (2003) dalam bukunya *English as a Global Language*, berkembangnya bahasa Inggris sebagai bahasa global tidak lepas dari adanya ekspansi kekuatan kolonial Inggris di akhir abad 19 dan kemudian diikuti dengan munculnya Amerika Serikat di abad 20 sebagai negara adidaya di bidang ekonomi.

Dampak penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global ini berpengaruh pada dunia pendidikan di negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Misalnya, di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah. Banyak sekolah, khususnya di kota-kota besar, yang menawarkan kurikulum yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya (*English as a Medium of Instruction* atau EMI).

Dari waktu ke waktu, bahasa Inggris telah berkembang menjadi bahasa yang banyak digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dianggap penting untuk dikuasai. Selain itu, biasanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka lebih lebar bagi mereka yang menguasai bahasa ini dengan baik. Dampak dari situasi ini membuat banyak

orang yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa Inggris jauh lebih penting daripada penguasaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Di sisi lain, banyak orang tua tidak mewariskan bahasa ibunya kepada anak-anaknya karena mereka berpendapat bahwa bahasa daerah tidak memiliki fungsi penting untuk masa depan anak-anak mereka. Di ranah keluarga, alih-alih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, komunikasi antaranggota keluarga cenderung dilakukan dalam bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah. Yang lebih memprihatinkan, sebagian keluarga yang tingkat sosial-ekonominya tinggi (biasanya mereka tinggal di kota-kota besar) menganggap bahwa bahasa Inggris jauh lebih penting daripada bahasa Indonesia sehingga di ranah keluarga pun mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Akibatnya, anak-anak di keluarga tipe ini lebih fasih berbicara dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, walaupun mereka lahir dan besar di Indonesia (Onishi, 2010; Urip, 2015; Basuningtyas, 2014). Kesimpulannya, dampak globalisasi membuat adanya situasi kebahasaan yang berbeda dari beberapa situasi kebahasaan yang telah disebutkan di atas.

## 2.2.4 Pelindungan bahasa-bahasa daerah

Terdapat begitu banyak pertanyaan kritis dari para pemerhati bahasa di dunia, terkait dengan upaya revitalisasi maupun konservasi bahasa di dunia sebagaimana pertanyaan “Apakah bahasa sekarat layak diselamatkan?” Pertanyaan ini termuat dalam sebuah artikel berbahasa Rusia dengan judul “Situasi Bahasa di Dunia” dalam jurnal Centre for Socio-Cognitive Discourse Studies at Moscow State Linguistic University 2016. Lebih lanjut penulis dalam makalah tersebut menanyakan apakah kita layak mempertahankan sebuah dialek yang hidup yang terkadang hanya dituturkan oleh hanya segelintir orang? (<http://scodis.com/for-students/linguarium/language-situation-in-the-world/>).

Pertanyaan lainnya datang dari Lane Wallace dalam judul artikelnya “Apa yang Hilang Saat Sebuah Bahasa Mati” dalam Jurnal The Atlantic terbitan November 11, 2009. Menjawab pertanyaan Wallace tersebut Lyle Campbell seorang linguist Amerika yang juga merupakan direktur Pusat Studi Universitas pada Bahasa-bahasa Indian Amerika mengatakan bahwa “Once a language dies, the knowledge dies with it” ‘ketika bahasa hilang, sebagian besar pengetahuan yang menyertainya hilang’. (<https://www.theatlantic.com/national/archive/2009/11/whats-lost-when-a-language-dies/29886/>). Bahkan, Samuel Johnson secara lebih tegas menyatakan,

bahwa *Language is the Garment of Thought* ‘Bahasa adalah pakaian pemikiran’, yang ia tuliskan dalam sebuah jurnal *Interdisciplinary Studies of Literature* / Vol. 1, No. 3, Sept., 2017.

Dari dua pertanyaan kritis sekaligus jawaban di atas, jelas sekali bahwa bahasa merupakan bagian terpenting dari ilmu pengetahuan sehingga dengan mempertahankan bahasa, sejatinya kita telah mempertahankan sebagian ilmu pengetahuan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, bahasa adalah identitas suatu bangsa yang terangkum dalam sebuah ungkapan Melayu, “Pupus bahasa pupuslah bangsa”. Dari sini jelas sekali, bahwa bahasa menjadi identitas dari sebuah bangsa. Seseorang dikenal identitasnya dari bahasa yang digunakannya. Jika hilang bahasanya, juga hilang jugalah identitas bangsanya. Dengan demikian, upaya revitalisasi maupun konservasi merupakan ikhtiar Badan Bahasa sebagai garda terdepan lembaga kebahasaan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Pasal 31).

## **2. 3 Tantangan-Tantangan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah**

Program revitalisasi bahasa yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kita dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi pemicu seorang individu dalam sebuah komunitas untuk dapat memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi kebhinekaan yang ada dalam suatu masyarakat bahasa untuk melihat bagaimana sikap bahasa penutur dan bagaimana posisi bahasa tersebut di kalangan komunitasnya sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat pula dikatakan bahwa terkadang sebuah program revitalisasi dari satu bahasa di satu daerah belum tentu dapat diaplikasikan pula untuk bahasa lain di daerah yang lain. Hal tersebut menjadi sulit karena dalam merancang sebuah program revitalisasi, perlu dilakukan berbagai pendekatan untuk mengetahui kondisi sosial, budaya, dan sikap bahasa dari penutur bahasa tersebut.

Pada hakikatnya, tujuan utama dari sebuah tindak revitalisasi adalah untuk mengembalikan bahasa dan/atau budaya ke posisi awalnya. Revitalisasi ini seringkali dikembangkan oleh linguis atau para pemerhati budaya, pemerintah, atau bahkan penutur bahasa itu dan pemilik kebudayaan tersebut. Namun, sebagian dari strategi ini bertujuan untuk menjadikan

bahasa yang terancam menjadi bahasa yang memiliki daya tarik dan berguna untuk penggunaannya, yang akhirnya terjadi transformasi pada bahasa yang terancam tersebut dan bukan mengembalikan ke fungsi awalnya.

Pedoman ini diharapkan dapat merefleksikan isu-isu ini: Tantangan apa yang dihadapi bahasa-bahasa yang direvitalisasi saat ini dan apa bedanya dengan tantangan yang dihadapi oleh bahasa-bahasa yang terancam punah? Seberapa realistisnya kesempatan untuk mengembalikan sebuah bahasa yang terancam punah pada ranah asalnya (khususnya ketika, bagi alasan pragmatik, kampanye revitalisasi cenderung berfokus pada ranah di luar rumah dibandingkan ranah di dalam rumah)? Apa konsekuensi revitalisasi bahasa dikaitkan dengan struktur linguistik dari ragam bahasa yang direvitalisasi? Seberapa jauh “penutur baru” dalam komunitas wicara suatu bahasa yang direvitalisasi juga menjadi pelaku perubahan linguistik? Sanggupkah perencanaan korpus secara menyeluruh mencegah hasil linguistik yang terjadi dari interaksi yang kuat dengan bahasa dominan? Apakah perencanaan bahasa nantinya akan memulihkan komunitas wicara atau mentransformasinya? Apakah “penutur baru” merasa janggal dengan penutur ‘tradisional’ dikaitkan dengan lokasi geografis mereka, latar belakang sosial mereka, keaslian ragam yang mereka tuturkan dan bahkan alasan untuk menuturkannya?—dan apakah revitalisasi ini kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan?

Banyak gerakan revitalisasi bahasa di dunia masih berada di tahap awal dalam pengembangannya (khususnya bila revitalisasi dipandang sebagai suatu proyek yang berlangsung pada beberapa generasi). Bruce (1999) mengatakan bahwa kelompok-kelompok seperti para rohaniawan cenderung mengembangkan dengan cara yang dapat diprediksi, mirip dengan tahap pengembangan yang ditemukan pada pemerolehan bahasa (Lightbown and Spada 2006). Ada juga beberapa faktor yang diidentifikasi dalam pengembangan upaya revitalisasi, misalnya kecenderungan untuk fokus pada pengenalan bahasa minoritas di sekolah, walaupun bukti penelitian menunjukkan bahwa upaya ini bukanlah strategi yang paling efektif, dibandingkan dengan peningkatan upaya penuturan bahasa di rumah. Bagi komunitas dan aktivis jauh lebih mudah mengkampanyekan untuk mengganti kurikulum sekolah dibandingkan dengan mengganti cara mereka dan cara tetangga mereka menggunakan bahasa.

Walaupun demikian yang menjadi prinsip bagi upaya revitalisasi bahasa yaitu diarahkannya tujuan pada pemulihan vitalitas bahasa yang sebenarnya, yakni memperkenalkan kembali bahasa pada anak-anak di rumah. Hal ini dikaitkan dengan besarnya pengaruh Joshua Fishman, seorang tokoh kunci dalam bidang ini (1991, 2001). Romaine (2006)

menyatakan bahwa, seperti pernyataan di atas, umumnya upaya revitalisasi pada masa kini tidak mengikuti anjuran Fishman untuk pertama kali fokus pada keluarga, namun langsung pada perluasan ranah, pendidikan formal, dsbnya. Fishman juga mengetahui hal ini:

Jauh lebih mudah untuk berpusat pada tahap-tahap lebih tinggi [dari skala vitalitas bahasanya, seperti pendidikan]. Namun tahap-tahap ini dicirikan oleh dua kekurangan yang disampingkan. . . (a) dihapus, sebagaimana adanya, dari inti utama yang aktual dari peralihan [bahasa-daerah], dan (b) tahap-tahap ini sungguh langsung menuju ke ketergantungan yang meningkat pada, konfrontasi dengan atau persaingan dengan bahasa-dalam-budaya yang dominan. . . Penekanan pada prioritas yang salah merupakan suatu contoh yang sangat mahal dari kurangnya suatu teori sosial atau model yang sesuai dari apa yang RLS [*reversing language shift*/ pengembalian pergeseran bahasa] perlukan. (1991: 112-13)

Grenoble dan Whaley (2006: 21) membagi revitalisasi ke dalam dua kategori, yaitu di level makro dan di level mikro. Revitalisasi pada level makro biasanya berhubungan dengan hukum, situasi politik, kebijakan, dan lain-lain yang biasanya berlaku pada tingkat nasional. Dengan demikian, hal ini juga secara otomatis termasuk di dalamnya dukungan pemerintah terhadap bahasa lokal, perencanaan bahasa di tingkat nasional, tujuan pendidikan (seperti pendidikan bilingual dan pendidikan dasar berbasis bahasa ibu), serta situasi bilingual dan multilingual di negara/wilayah tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa level makro ini berada di luar kendali komunitas lokal, namun dampak dari kebijakan ini perlu diketahui lebih dulu sebelum mulai diimplementasikan pada masyarakat bahasa. Di sisi lain, revitalisasi pada level mikro melibatkan demografi, sikap bahasa, kegiatan budaya, serta situasi kebahasaan yang ada pada komunitas bahasa lokal. Dengan demikian, penting untuk diketahui apakah komunitas bahasa itu tinggal berdekatan dengan komunitas bahasa yang lain sehingga memunculkan adanya kontak bahasa yang intens? Selain itu, dapat juga dilihat bagaimana kesempatan pendidikan yang mereka miliki? Sejauh mana mereka memiliki kesempatan menggunakan bahasa mereka sendiri?

Ada empat langkah yang dapat dilakukan dalam sebuah perencanaan bahasa menurut Kaplan dan Baldauf (1998). Langkah-langkah tersebut mencakup beberapa hal berikut ini.

## 1. Perencanaan Korpus

Perencanaan ini sangat erat kaitannya dengan dokumentasi bahasa karena hal ini berkaitan dengan material data yang dikumpulkan. Data-data yang berhasil didokumentasikan nantinya dapat berperan penting dalam penyediaan evidence based-corpora untuk kemudian digunakan dalam penyusunan kamus, materi pengajaran bahasa, serta tata bahasa. Tentu saja hal ini yang menjadi penopang utama untuk perencanaan bahasa-dalam-pendidikan nantinya. Ada beberapa hal yang kemudian diperkenalkan juga pada kegiatan perencanaan korpus ini, yaitu konsep standarisasi dan ortografi untuk bahasa minoritas. Hal ini kemudian tentunya akan menghadirkan sebuah permasalahan baru yang dilematis. Ada banyak bahasa di NKRI ini yang memiliki banyak dialek dan yang tidak memiliki. Akan sangat sulit menerapkan konsep standarisasi untuk bahasa yang memiliki banyak dialek.

## 2. Perencanaan Status

Perencanaan status ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang ditetapkan melalui UU No. 24 tahun 2009 pasal 42 sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut adalah PP 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kemudian, dasar hukum ini masih diperkuat lagi dengan UU Pemajuan Kebudayaan yang memasukkan bahasa sebagai bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan

masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang cukup, salah satunya untuk pelestarian bahasa-bahasa daerah.

### 3. Perencanaan Bahasa-dalam-Pendidikan

Dari beberapa uraian pada bagian awal tulisan ini dijelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa adalah adanya interferensi dari luar, yaitu pihak pengelola pendidikan, dalam hal ini guru dan sekolah. Jika memang tidak ada tempat bagi bahasa daerah, dalam sistem pendidikan formal, kiranya pemerintah dapat memberikan tempat dalam pendidikan informal, di luar jam sekolah misalnya, atau dengan memberikan kebebasan pada pihak sekolah untuk mengatur mengenai hal ini. Perencanaan ini juga dikenal sebagai perencanaan pemerolehan bahasa dan di dalamnya termasuk media pendidikan untuk bahasa daerah. Kemudian, pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua, revitalisasi atau pelestarian bahasa-bahasa yang terancam punah melalui pengajaran yang formal atau informal, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa.

Meskipun demikian ada beberapa isu yang masih perlu didiskusikan bersama sebelum memulai perencanaan pemerolehan bahasa ini. Beberapa hal di antaranya adalah bahasa apa yang akan diajarkan? Jika bahasa tersebut memiliki banyak dialek, dialek mana yang kemudian akan dipilih untuk diajarkan? Apakah diajarkan satu dialek saja ataukah diajarkan beberapa dialek sekaligus? Kemudian, di usia berapa sebaiknya pengajaran ini dimulai? Pelatihan guru, metode pengajaran, sumber dan materi, siapa yang menentukan kurikulum? Apakah perlu diadakan ortografi yang standar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui diskusi-diskusi dan studi-studi berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya.

### 4. Perencanaan prestise

Jenis perencanaan ini mempromosikan pandangan yang positif terhadap bahasa, keragaman linguistik, praktik multilingualisme. Linguis sudah lama mengetahui keuntungan kognitif dari multilingualisme dan pendidikan berbahasa ibu, namun lemah dalam mempublikasikannya. Sikap bahasa merupakan kunci dalam pelestarian bahasa. Kita harus melawan sikap bahasa yang negatif dan ideologi yang merosot. Hal ini vital bila penerapannya berhasil. Contohnya: bahasa Irlandia (Fennell, 1981; Cooper, 1989)

## 2.4. Praktik Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Selama Ini

Selama ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam kajian-kajian atas bahasa-bahasa daerah di Indonesia, yaitu Badan Bahasa dari Kemdikbud, LIPI dari BRIN, dan universitas-universitas di Indonesia. Namun perlu diakui bahwa tidak terlalu banyak riset yang berfokus pada bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit yang dilakukan oleh peneliti Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada dilakukan oleh lembaga-lembaga riset asing, seperti Max Planck Institute di Jerman, Summer Institute of Linguistics (SIL) di Amerika, Endangered Language Development Program (ELDP) di Inggris, dan Linguistics Dynamics Sciences (LingDy) di Tokyo, Jepang. Sejauh ini, kajian-kajian tentang kepunahan bahasa di Indonesia yang dilakukan lembaga pemerintahan seperti Badan Bahasa dan LIPI masih dilakukan menggunakan kerangka pendekatan dari UNESCO.

Kebutuhan akan adanya kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas berbasis komunitas belakangan ini mulai marak dikaji di kalangan pegiat revitalisasi dan akademisi di dunia. Di Indonesia sendiri pada dasarnya ada beberapa hal berbeda yang dapat dibandingkan antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pihak nonpemerintah. Untuk melakukan praktik perlindungan bahasa daerah ini, Balai dan Kantor bahasa di Indonesia juga sudah melakukan beberapa kegiatan.

Selain produk bahasa dan sastra, Badan Bahasa juga telah mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dari sekolah-sekolah di mana wilayahnya menjadi target revitalisasi bahasa. Agar karya bahasa dan sastra yang telah dihasilkan Balai dan Kantor Bahasa tersebut tidak sia-sia, berbagai upaya lanjutan perlu disinergikan dengan yang sudah ada agar revitalisasi bahasa dan sastra ini dapat mencapai hasil yang optimal.

Namun, seperti telah disampaikan di atas, revitalisasi tidak akan berhasil jika hanya ada satu pihak saja yang aktif. Generasi muda saat ini adalah generasi milenial yang menginginkan hal-hal yang baru, menarik, dan dinamis. Oleh karena itu, khusus untuk bahasa-bahasa yang termasuk dalam Model C ini, pendekatan baru perlindungan bahasa dan sastra daerah perlu diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya sekolah yang menjadi basis kegiatan ini.

Praktik perlindungan bahasa daerah yang dilakukan di wilayah Indonesia timur pada umumnya dilakukan dengan pengembangan komunitas dan kegiatan berbasis kelompok penutur. Untuk bahasa-bahasa

dengan jumlah penutur yang sedikit, tidak jarang pula dilakukan kegiatan yang berbasis keluarga atau perorangan. Kegiatan seperti ini, seringkali juga digagas oleh lembaga keagamaan, seperti lembaga gereja, misalnya yang terjadi di banyak komunitas penutur di wilayah Papua dan Papua Barat melalui proses penerjemahan Alkitab. Selain itu, di bahasa yang agak banyak penuturnya, seperti di Ternate, Maluku Utara, praktik baik revitalisasi ini juga ada yang dilakukan melalui proses pembelajaran berbasis komunitas. Salah satu di antaranya adalah kelas Bahasa Ternate yang digagas oleh komunitas Jarkot (Jaringan Komunitas Ternate) di Benteng Oranje. Bahkan, komunitas ini pun sudah mulai menggunakan ranah digital, seperti media sosial Facebook dan Instagram, untuk melakukan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra Ternate.

Adapun pendanaan dari berbagai program tersebut diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang paling banyak sejauh ini adalah pendanaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Ada juga kerja sama yang dilakukan sebagai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ataupun dinas pendidikan. Kemudian, ada pula yang program revitalisasi yang dilakukan menggunakan dana dari riset universitas (terutama untuk program revitalisasi yang merupakan kerja sama antar universitas dengan lembaga lain), baik dari kampus dalam negeri, maupun kampus di luar negeri. Di beberapa tempat, salah satunya di wilayah Pagu, Halmahera Utara, pihak adat dan pemerintahan desa sudah melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan tambang yang ada di sekitar area mereka. Kerja sama tersebut dilakukan untuk pendirian semacam rumah budaya untuk pelestarian bahasa dan tradisi lisan di wilayah Pagu. Freeport di Papua menyediakan dana yang tidak kecil setiap tahunnya untuk beberapa komunitas bahasa yang ada di sekitar pertambangan mereka demi peningkatan pendidikan dan kebahasaan. Di samping itu, untuk bahasa dengan jumlah penutur yang kecil, tidak jarang juga ditemukan kegiatan revitalisasi berbasis masyarakat yang sifatnya lebih mandiri, yaitu menggunakan pendanaan dari LSM atau bahkan swadaya dari masyarakat penutur itu sendiri.



## **BAB III**

# **PENDEKATAN BARU PELINDUNGAN BAHASA MODEL C**

Pendekatan baru perlindungan bahasa di model C ditujukan untuk bahasa daerah dengan karakteristik daya hidup bahasa yang masuk dalam kategori mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis atau bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit dan sebaran terbatas. Pada umumnya, ekologi bahasa-bahasa kecil ini tidak ada bahasa yang dominan. Pendekatan model C diterapkan melalui beberapa hal, yaitu pewarisan, pembelajaran, dan identifikasi actor atau pelaku. Pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Pewarisan bahasa diharapkan dapat terjadi secara alamiah. Pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat, seperti balai desa, tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat. Identifikasi aktor atau pelaku revitalisasi yang sudah ada di masyarakat penutur itu sendiri. Dari segi kemitraan, kemitraan yang kemudian dapat disasar dalam kategori ini adalah kemitraan dengan Pemda (Disdik), komunitas/pegiat, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan mitramuda Duta Bahasa, hingga para mahasiswa (baik di perguruan tinggi setempat atau pun dari perguruan tinggi lain).

Berdasarkan observasi singkat yang telah dilakukan, Revitalisasi Bahasa Model C ini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Meskipun demikian, kami tetap merasa perlu untuk membuat batasan untuk membedakan masing-masing pendekatan tersebut. Memang pada hakikatnya, program revitalisasi untuk model C diprioritaskan untuk dua hal, yaitu perencanaan pemerolehan dan perencanaan prestise. Perencanaan pemerolehan ini berfokus pada ranah pendidikan, baik berbasis sekolah, komunitas, maupun di rumah dengan cara yang berbeda. Di sekolah, pemerolehan bahasa daerah ini direncanakan untuk dilakukan dengan menggunakan materi ajar yang sudah disusun untuk disampaikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, untuk pendekatan ini diperlukan adanya analisis kebutuhan dan survei untuk ketersediaan SDM guru dan sarana sekolah yang cukup.

Sementara itu, untuk pendekatan berbasis komunitas, juga dapat dilakukan hal serupa. Namun, hal ini harus diawali dengan analisis kebutuhan dan survei pendataan profil komunitas tutur yang ada di wilayah yang disasar. Kemudian, komunitas ini dijaring dan diberi pembekalan agar mereka dapat membuat dan menyusun materi ajar sendiri atau paling tidak mengadakan kegiatan terkait kampanye penggunaan bahasa daerah. Di sisi lain, untuk pendekatan berbasis keluarga/individu, lebih menitikberatkan pada pertambahan ranah penggunaan bahasa daerah dan peningkatan kesadaran berbahasa daerah.

Kemudian, pada perencanaan prestise, dapat dilakukan kampanye pengenalan bahasa dan sastra daerah di media sosial, seperti pembuatan podcast dan pemberian penghargaan bagi pelaku atau pegiat bahasa daerah yang memiliki peran penting dalam pelestarian bahasa daerah. Dengan demikian, melalui kegiatan ini diharapkan agar penutur bahasa daerah itu dapat memperoleh kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa daerah mereka. Oleh karena itu, pada perencanaan prestise ini, lebih berfokus pada komunitas tutur dibandingkan pendidikan.

### 3. 1 Konsep Dasar

Kegiatan revitalisasi bahasa merupakan upaya perlindungan bahasa yang berfokus pada peningkatan penggunaan bahasa daerah dan jumlah penutur muda. Peningkatan penggunaan bahasa daerah dan jumlah penutur muda dapat dilakukan dalam berbagai cara atau model dengan disesuaikan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah pengamatan setempat. Jumlah penutur muda bahasa daerah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang bahasanya direvitalisasi, baik berbasis komunitas, masyarakat, atau sekolah.

Kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap bahasa yang masuk dalam kategori terancam, mengalami kemunduran, dan rentan. Kategori tersebut berdasarkan pada hasil kajian vitalitas bahasa, baik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun pihak eksternal. Peserta yang dipilih (dilibatkan) dalam kegiatan revitalisasi merupakan kelompok penutur jati muda yang diharapkan menjadi proyek percontohan (*pilot project*) untuk menyebarkan hasil revitalisasi tersebut di wilayahnya.

Khusus untuk penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa disebut “Tunas Bahasa Ibu”. Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam

bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Aktor revitalisasi adalah individu ataupun komunitas yang secara aktif mengampanyekan kegiatan revitalisasi bahasa mereka sendiri, baik melalui pendekatan pembelajaran, maupun pengembangan literasi.

Ekosistem bahasa dan sastra adalah tata interaksi yang saling menunjang antarpelaku, masyarakat, dan lingkungan, serta produk-produk bahasa dan sastra dalam suatu wilayah tertentu. Inti yang mencirikan suatu ekosistem adalah *pola hubungan* antarunsur yang *saling menunjang* dan terjadi dalam suatu lingkup *wilayah* tertentu. Istilah ini merupakan analogi yang diambil dari ilmu biologi, yang menyatakan bahwa ekosistem adalah tata interaksi yang saling menunjang antara berbagai makhluk hidup dan unsur tak hidup dalam sebuah lingkungan.

Dalam menyusun sebuah rekomendasi untuk kegiatan revitalisasi, diperlukan perhatian pada sejumlah aspek mengenai *output* (luaran), *outcome* (hasil) dan *impact* (dampak) serta ukuran kinerja bagi setiap aspek tersebut. Dalam hal penyusunan *output*, dapat diperiksa capaian jangka pendek, yaitu menyangkut:

- 1) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah (termasuk sastra lisan dan sastra tulis) yang masih difungsikan;
- 2) Ketersediaan data dan informasi mengenai pelaku/pegiat bahasa dan sastra daerah dalam kegiatan tradisional;
- 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana bidang bahasa dan sastra daerah;
- 4) Ketersediaan data dan dokumentasi bahasa, seperti kamus, tata bahasa, daftar kata, serta kajian-kajian tentang bahasa tersebut, serta ketersediaan data dan dokumentasi sastra daerah, seperti publikasi ataupun rekaman;
- 5) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang sudah tidak lagi difungsikan;
- 6) Ketersediaan data dan informasi tradisional bahasa dan sastra daerah yang sudah berubah fungsinya;
- 7) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah;
- 8) Ketersediaan data dan informasi ekosistem bahasa dan sastra daerah yang masih ada.

Penyusunan *outcome* diupayakan dapat dilihat dalam jangka menengah, yaitu menyangkut:

- 1) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 2) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan dari komunitas bahasa itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 4) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan media dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 5) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah; serta
- 6) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan sektor pendidikan dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

Oleh karena itu, diharapkan nantinya hal-hal tersebut dapat membantu terbentuknya ekosistem bahasa sehingga diharapkan memiliki dampak sebagai berikut.

- 1) Menghidupkan kembali Ekosistem bahasa dan sastra daerah agar mampu menumbuhkan motivasi para pelakunya untuk lebih kreatif;
- 2) Menghidupkan kembali Ekosistem bahasa dan sastra daerah mampu menambah ranah penggunaan bahasa daerah dan juga menambah daya kreasi atas sastra daerah;
- 3) Menghidupkan kembali Ekosistem bahasa dan sastra daerah ini mampu mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, komunitas, serta individu pegiat dan penutur;
- 4) Menghidupkan kembali Ekosistem bahasa dan sastra daerah mampu melahirkan generasi-generasi penerus untuk mewarisi budaya (seni) tradisional; dan
- 5) Menghidupkan kembali Ekosistem bahasa dan sastra daerah untuk menambah *income* pelakunya.

Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah ini dikoordinasi dan difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbudristek. Kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah untuk Model C ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Merumuskan masalah, yaitu tahapan untuk merumuskan permasalahan yang tengah dihadapi dalam hal kepunahan dan hilangnya ekosistem bahasa dan sastra daerah;
2. Mengumpulkan informasi merupakan tahapan kedua setelah rumusan masalah didapatkan, dengan menitik beratkan pada isu utama;
3. Melakukan survei dengan menggunakan alat atau kuesioner kepada komunitas pengguna bahasa tersebut untuk mengetahui vitalitas bahasa dan sikap bahasa penutur; mengidentifikasi keberadaan komunitas dan individu pegiat bahasa dan sastra daerah.
4. Membuat rekomendasi dan kesimpulan, hasil analisis data selanjutnya disimpulkan dengan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan
5. Koordinasi antara pemerintah pusat (Badan Bahasa dan UPT-nya) dan pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan dinas pariwisata.
6. Diskusi kelompok terpumpun (DKT [*FGD, focused group discussion*]) dalam rangka penyusunan model pembelajaran bahasa daerah. DKT ini dilaksanakan oleh Badan Bahasa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sastrawan, budayawan, dosen, guru, mahasiswa, pegiat bahasa/sastra daerah, dan komunitas penutur bahasa daerah.
7. Mengidentifikasi kebutuhan pendekatan revitalisasi yang cocok untuk dilakukan di wilayah tersebut dan memastikan kembali ketersediaan dokumentasi dan bahan ajar untuk bahasa dan sastra daerah.
8. Pelatihan Guru Utama (*Training of Trainer* [TOT]) untuk para guru utama yang akan melakukan diseminasi kepada para guru atau pengajar bahasa daerah yang ada di tiap kabupaten/kota masing-masing. Pelatihan ini difasilitasi oleh Badan Bahasa dengan melibatkan para narasumber dari kalangan pemerintah daerah, sastrawan, budayawan, dosen, guru, dan pegiat bahasa/sastra daerah. (Jika dipilih pendekatan pendidikan).
9. Diseminasi model pembelajaran bahasa daerah dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah kepada para guru atau pengajar bahasa daerah di tiap sekolah atau komunitas.
10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di tiap sekolah atau komunitas.

11. Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat sekolah hingga tingkat provinsi. Festival ini merupakan sarana atau ajang menampilkan hasil revitalisasi, baik berupa lomba maupun unjuk kebolehan.
12. Pelatihan dan pengayaan (fasilitasi komunitas) untuk komunitas yang terlibat dalam praktik revitalisasi bahasa dan sastra daerah.
13. Pemberian penghargaan terhadap pelaku (individu ataupun komunitas) revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang aktif mengampanyekan dan memperjuangkan bahasa dan sastra daerah.
14. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak nonpemerintah untuk membantu berjalannya praktik baik revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini, misalnya kerja sama dengan universitas melalui program MBKM dan juga kerja sama dengan pihak swasta.

Penyusunan indikator kinerja pembangunan Ekosistem bahasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Indikator	Keterangan
1	Jumlah bahasa yang masih difungsikan	Besaran
2	Jumlah komunitas bahasa yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana.	Besaran
3	Prosentase dukungan pemerintah terhadap Ekosistem bahasa	Persentase
4	Prosentase dukungan sektor swasta terhadap Ekosistem bahasa	Persentase
5	Prosentase dukungan media terhadap Ekosistem bahasa	Persentase
6	Prosentase partisipasi masyarakat terhadap Ekosistem bahasa	Persentase
7	Prosentase dukungan sektor pendidikan terhadap Ekosistem bahasa	Persentase

## 3. 2 Revitalisasi Berbasis Sekolah

Model revitalisasi ini mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah. Salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam mengukur keberhasilan

revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah pembuatan konsep kegiatan revitalisasi bahasa. Kesalahan dalam melakukan pembuatan konsep kegiatan revitalisasi bahasa dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan revitalisasi bahasa. Konsep revitalisasi bahasa dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain seperti berikut ini.

1. Pembelajaran bahasa daerah melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler dengan ketersediaan bahan atau materi.
2. Penyusunan bahan ajar untuk muatan lokal atau ekstrakurikuler.
3. Advokasi ke pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
4. Pelatihan bahasa daerah kepada guru/ pelatihan pengajaran kepada pegiat bahasa dan sastra daerah.
5. Perlombaan/pergelaran seni/pertunjukan kebahasaan dan festival sastra daerah.
6. Pelibatan pihak universitas dan mahasiswa melalui program MBKM.

Hal yang perlu diperhatikan di dalam konsep kegiatan revitalisasi bahasa pendekatan pendidikan untuk Model C ini adalah diperlukan dukungan pendataan yang baik agar pelaksanaannya dapat lebih efektif. Pendekatan pendidikan ini bisa berhasil hanya jika sudah tersedia dokumentasi bahasa yang cukup untuk penyusunan materi ajar dan penyusunan kurikulum. Dengan kata lain, ketersediaan dokumentasi bahasa dan sastra daerah menjadi kunci utama berjalannya pendekatan ini untuk model C. Proses pendampingan juga diperlukan untuk membangun dan menyamakan persepsi bagi sekolah, guru master, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pendekatan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan revitalisasi bahasa. Konsep kegiatan revitalisasi bahasa dilaksanakan tidak hanya pada tahun tertentu saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun berikutnya hingga lima tahun ke depannya.

### 3. 3 Revitalisasi Berbasis Komunitas

Pendekatan revitalisasi berbasis masyarakat/komunitas untuk Model C tentunya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal yang perlu diperhatikan di dalam konsep kegiatan revitalisasi bahasa adalah proses pendampingan untuk membangun masyarakat, komunitas, atau sekolah sebagai tindak lanjut dari kegiatan revitalisasi bahasa. Revitalisasi ini dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa hal berikut ini.

- a. Pendataan komunitas yang aktif mengampanyekan penggunaan bahasa.
- b. Pelibatan komunitas dan masyarakat dalam revitalisasi, melalui kampanye bersama dan berkegiatan bersama.
- c. Penguatan dan pelatihan untuk komunitas, misalnya dengan pengayaan dan pendampingan untuk program-program literasi komunitas, terutama untuk kaum muda.
- d. Pemberdayaan komunitas di wilayah diaspora.
- e. Penguatan aktivis digital di kalangan komunitas dan masyarakat bahasa
- f. Program hibah fasilitasi komunitas untuk kegiatan revitalisasi.
- g. Pameran kegiatan komunitas melalui Festival Tunas Bahasa Ibu.

Pada pendekatan ini, pengembangan komunitas menjadi tujuan utama dari revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Dengan demikian, bentuk kegiatan revitalisasi yang akan dilakukan dapat lebih variatif sesuai dengan kreativitas dari masing-masing komunitas tersebut. Oleh karena itu, pelibatan kaum muda juga menjadi hal yang penting untuk mengangkat kreativitas dalam mengampanyekan penggunaan bahasa dan sastra daerah.

Meskipun demikian, fungsi pengawasan dan evaluasi dari pendekatan ini tetap berada di bawah naungan Badan Bahasa, melalui Balai dan Kantor Bahasa di daerah. Koordinasi dan kerja sama antarlembaga juga sangat dimungkinkan dalam pengembangan komunitas ini, misalnya kerja sama dengan dinas pariwisata atau dinas pendidikan di daerah. Bersama-sama dapat mengawal pengembangan bahasa dan sastra daerah dengan mengangkat status dan ranah penggunaannya.

### 3. 4 Revitalisasi Berbasis Masyarakat (Keluarga/ Individu)

Tidak semua bahasa memiliki latar belakang ekosistem yang sama, terlebih lagi di kalangan bahasa-bahasa yang masuk ke dalam Model C ini. Dengan demikian, kita harus mengakui, bahwa untuk bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang sangat kecil, terkadang juga sulit untuk dilakukan revitalisasi, bahkan dengan pendekatan revitalisasi berbasis komunitas sekalipun. Oleh karena itu, kita perlu mulai mengidentifikasi peran keluarga dan individu dalam revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Untuk bahasa seperti ini, kita dapat melakukan pendekatan praktik revitalisasi sebagai berikut.

- a. Kolaborasi antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan survei dan pendataan, terutama dengan pemerintahan desa.

- b. Pendataan individu pemerhati bahasa dan sastra daerah
- c. Untuk bahasa dengan jumlah penutur sedikit (kurang dari 3000 penutur), dilakukan penguatan dengan gerakan “satu guru (duta) bahasa daerah, satu bahasa”
- d. Pelibatan aktif orang tua dalam pengajaran bahasa ibu ke anak-anak di dalam rumah.
- e. Penentuan keluarga percontohan atau duta bahasa (individu) yang aktif mengampanyekan bahasa daerah.
- f. Memberikan penghargaan pelaku bahasa dan sastra daerah terhadap individu yang aktif mengampanyekan penggunaan bahasa daerahnya sendiri. Penentuan penghargaan ini dapat dipilih sendiri oleh komunitas atau ditentukan oleh balai/kantor bahasa, pemerintah daerah, atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam pendekatan ini, tetap diperlukan adanya kerja sama dengan komunitas penutur dan juga pihak terkait lainnya. Kemudian, perlu diakui juga, ada kesulitan yang akan ditemui untuk pendekatan ini, yaitu pengawasannya menjadi lebih sulit karena variabelnya menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penting untuk mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah dan pihak pemerintahan desa agar fungsi pengawasannya dapat lebih maksimal.

### 3.5 Implementasi dan Pengendalian Mutu

Implementasi yang diharapkan dari Model C merupakan suatu bentuk yang dapat diterapkan pada tiga macam basis revitalisasi: sekolah, komunitas, dan keluarga/individu. Salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam mengukur keberhasilan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah pembuatan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Kesalahan dalam melakukan pembuatan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan revitalisasi.

#### 3. 5. 1 Persiapan Revitalisasi

Pada tahap ini, perevitalisasi mulai mengumpulkan informasi tentang objek atau bahasa yang menjadi sasaran revitalisasi. Dengan demikian, secara otomatis pada tahap ini perlu adanya koordinasi yang baik antara Perevitalisasi Pusat, Perevitalisasi Balkan, dan juga pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam program revitalisasi ini. Salah satu hal yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah melakukan survei ke wilayah yang akan menjadi daerah revitalisasi.

Hal yang wajib dilakukan Perevitalisasi Pusat dan Perevitalisasi Balkan saat melakukan tahap survei dan koordinasi adalah melakukan survei daerah pengamatan. Perevitalisasi Pusat dan Perevitalisasi Balkan perlu melakukan observasi terlebih dahulu ke daerah pengamatan sebagai langkah awal tahap survei dan koordinasi kegiatan revitalisasi bahasa. Survei daerah pengamatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi kebahasaan yang disesuaikan dengan hasil kajian vitalitas bahasa sebelumnya. Pada tahap ini, juga dilakukan penentuan, pendekatan revitalisasi Model C yang mana yang akan dipilih untuk dilakukan.

Survei daerah pengamatan ini mempunyai cakupan luas. Mulai dari survei pemukiman tempat tinggal penutur bahasa sasaran, survei sekolah atau tempat pembelajaran lainnya, dan survei komunitas atau tempat adat setempat. Survei daerah pengamatan ini berguna untuk melakukan kesesuaian antara hasil kajian vitalitas bahasa pada kegiatan sebelumnya dan memastikan kecocokan model kegiatan revitalisasi bahasa sasaran.

Survei daerah pengamatan juga dapat dilakukan ke tempat-tempat pemangku kepentingan. Mulai dari survei ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, survei ke tokoh masyarakat, survei ke tokoh adat, maupun survei ke tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah pengamatan setempat. Dengan demikian, survei ini juga dapat digunakan untuk melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Survei daerah pengamatan tidak hanya berkunjung melihat situasi dan kondisi kebahasaannya tetapi juga melakukan asesmen atau konfirmasi beberapa hal tentang kegiatan revitalisasi bahasa. Mulai dari kesediaan adanya kegiatan revitalisasi, faktor penurunan penggunaan bahasa, alasan tidak adanya transmisi bahasa daerah ke penutur muda, dan lain-lain. Selama survei daerah pengamatan, perevitalisasi dapat mengambil gambar dan video untuk mendukung penggambaran daerah pengamatan kegiatan revitalisasi bahasa.

### 3. 5. 2 Pelatihan dan Pembekalan

Kegiatan revitalisasi bahasa memiliki tahapan yang tergolong lama pada tahap pembelajaran atau pelatihan. Hal ini disebabkan jangka waktu tahap pembelajaran atau pelatihan ini adalah dua sampai tiga bulan lamanya. Jangka waktu yang lama tersebut diharapkan dapat membuat peserta revitalisasi bahasa dapat mempelajari bahasa daerahnya dengan baik dan menarik minat penutur muda ke depannya. Dalam hal ini, tahap

pembelajaran atau pelatihan terdiri atas pemilihan pengajar, penentuan peserta, pembuatan konsep, dan pengajaran bahasa daerah.

Pengajar dan peserta kegiatan revitalisasi bahasa harus melakukan kesepakatan pembelajaran atau pelatihan bahasa daerah sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk pengayaan dan pembekalan komunitas pegiat bahasa daerah. Pembekalan, pembelajaran ataupun pelatihan bahasa daerah dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah tahap survei dan koordinasi kegiatan revitalisasi bahasa. Jadwal pembekalan, pembelajaran atau pelatihan bahasa daerah disesuaikan dengan kebiasaan pengajar dan peserta kegiatan revitalisasi bahasa dengan jadwal mingguan atau bulanan.

Pengajar dan peserta pelatihan dan pengajaran harus melaporkan perkembangan pembelajaran atau pelatihan bahasa daerah kepada Perevitalisasi Balkan dan/atau Perevitalisasi Pusat dengan mengirimkan rekaman audiovisual. Materi pembelajaran atau pelatihan bahasa daerah harus diketahui dan dikirimkan ke Perevitalisasi Balkan dan/atau Perevitalisasi Pusat.

Khusus untuk model C dengan pendekatan keluarga/individu, pembekalan yang dilakukan bersifat observasi partisipatoris oleh perevitalisasi pusat atau perevitalisasi balai dan kantor bahasa. Observasi ini diperlukan untuk mengevaluasi keluarga atau individu yang akan dipilih untuk mengikuti program revitalisasi ini.

### 3. 5. 3 Revitalisasi

Pada tahapan ini, program revitalisasi mulai dilaksanakan. Dengan kata lain, guru yang terpilih dan komunitas yang terpilih sudah dapat terjun ke masyarakat untuk menjalankan program revitalisasi ini. Pada tahap ini, hasil pembelajaran atau pelatihan serta pembekalan komunitas bahasa daerah diperlihatkan kepada masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan maupun menggiatkan penggunaan bahasa daerah bagi penutur muda. Hasil pembelajaran atau pelatihan bahasa daerah juga dapat dimanfaatkan maupun dikembangkan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya ke depannya secara mandiri. Dalam hal ini, ada dua komponen penting dalam tahap pertunjukan, yaitu perekaman audiovisual dan penutur muda sebagai tunas bahasa ibu.

Aksi revitalisasi bahasa dan sastra daerah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain seperti di bawah ini.

a) Revitalisasi Bahasa

1. Pemelajaran bahasa daerah melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler.
2. Penyusunan bahan ajar untuk muatan lokal.
3. Advokasi ke Pemda untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan bahasa.
4. Pelatihan bahasa daerah kepada guru/ pelatihan pengajaran kepada pengiat bahasa.
5. Perlombaan/pergelaran seni/pertunjukan kebahasaan.
6. Aktivisme Digital (*Digital Activism*) oleh komunitas penutur bahasa daerah.
7. Hibah Fasilitasi Komunitas Penutur Bahasa Daerah.
8. Podcast Cerita Penutur (Memperkenalkan profil penutur bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan juga memperkenalkan bahasa daerah mereka masing-masing) (Festival Bahasa Ibu).
9. Pameran kebahasaan berdasarkan dokumentasi yang ada: kamus, naskah, dll. (Festival Bahasa Ibu).

b) Revitalisasi Sastra

1. Pemelajaran sastra daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler atau bengkel sastra.
2. Penyusunan bahan ajar untuk muatan lokal atau buku antologi.
3. Penyaduran karya sastra berdasarkan sastra lisan dan manuskrip.
4. Alih wahana (komik, animasi/film, naskah drama, musikalisasi puisi, dll.).
5. Perlombaan/pergelaran seni/pertunjukan kesastraan.
6. Katong Bacarita (sinilar tentang cerita rakyat daerah di Indonesia timur) (Festival Bahasa Ibu).
7. Pameran Sastra Daerah (pertunjukan sastra lisan) (Festival Bahasa Ibu).
8. Hibah Fasilitasi Komunitas Sastra Daerah.
9. Aktivisme Digital (*Digital Activism*) oleh komunitas sastra daerah.

### 3. 5. 4 Pelaporan Hasil

Kegiatan revitalisasi bahasa dapat menghasilkan berbagai keluaran, seperti laporan kegiatan, rekaman audiovisual, artikel kegiatan, dan rekomendasi kebijakan. Keluaran yang wajib ada adalah laporan kegiatan dan rekaman audiovisual,, sedangkan keluaran pilihan adalah rekomendasi kebijakan, artikel kegiatan, dan keluaran lain yang dianggap relevan.



## BAB IV

## PENUTUP

Program revitalisasi bahasa yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kita dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi pemicu seorang individu dalam sebuah komunitas untuk dapat memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan. Dalam hal ini analisis kebutuhan perlu disusun dan survei lapangan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi atau karakteristik yang menjadi bahasa sasaran revitalisasi. Revitalisasi Model C ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan yang bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba mewadahi berbagai situasi sebagai reaksi atas hasil analisis kebutuhan bagi bahasa-bahasa kecil yang ada di Indonesia ini.

Meskipun demikian, pada hakikatnya pendekatan Revitalisasi Model C ini memprioritaskan revitalisasi berbasis komunitas dan masyarakat (keluarga/individu). Namun, pedoman ini juga disusun dengan tidak kaku sehingga dapat juga memfasilitasi pendekatan revitalisasi berbasis sekolah jika memang bahasa tersebut sesuai dan bisa menerapkan pendekatan yang berbasis sekolah.

Harapan ke depan dari penyusunan ini adalah agar masyarakat penutur dapat lebih terwadahi sehingga mereka dapat memberikan tempat yang lebih untuk penggunaan bahasa daerah mereka sendiri. Biar bagaimanapun, nasib masa depan bahasa daerah itu ada di tangan penuturnya sendiri. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan membantu mendorong penggunaan bahasa tersebut ke ranah yang lebih tinggi.

# DAFTAR RUJUKAN

## Buku dan Jurnal

- Afria, R. (2017). Inventarisasi Kosakata Arkais Sebagai Upaya Penyelamatan dan Perlindungan Bahasa Melayu Kuno di Provinsi Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(2), 254-265. DOI: <https://doi.org/10.22437/titian.v1i2.4232>.
- Anderbeck, Karl. 2013. (submitted for publication in Pacific Linguistics' ICAL 2012 Proceedings, Vol. 2: Language Documentation and cultural practices in the Austronesian world).
- Arka, I.W. (2013). Language management and minority language maintenance in (eastern) Indonesia: Strategic issues. *Language Documentation and Reservation*, 7, 74-105, <http://nflrc.hawaii.edu/ldc/>; <http://hdl.handle.net/10125/4568>.
- Basuningtyas, D.I.A. 2014. Code switching by three young Indonesian-English bilinguals. Unpublished Master's thesis. Atma Jaya Catholic University of Indonesia.
- Berlianty, T., & Balik, A. (2018). Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Kertha Patrika*, 40(2), 99-111.
- Bühmann, Dörthe & Trudell, Barbara (2008) *Mother Tongue Matters: Local Language as a Key to Effective Learning*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352.
- Bruce, S. 1999. *Sociology*. Oxford University Press.
- Crystal, D. (2003). *English as a global language*, 2<sup>nd</sup> edition. Cambridge: CUP.
- Lightbown, P. M., & Spada, N. (2006). *How Languages Are Learned* (3rd ed.). Oxford: Oxford University.
- Ethnologue (2020). Indonesia. Diunduh dari [ethnologue.com/country/ID](http://ethnologue.com/country/ID).
- Evans, N. 2009. *Dying words: endangered languages and what they have to tell us*. Oxford: Wiley-Blackwell

- Fishman, J. A. (1991). *Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages* (Vol. 76). Multilingual matters.
- Grenoble, L.A. (2021). Revitalizing endangered languages : a practical guide ( Eds: Justyna Olko, Julia Sallabank). School of Oriental and African Studies. New York : Cambridge University Press. DOI 10.1017/9781108641142.
- Grenoble, L. A dan L. J. Whaley. 2006. *Saving Languages: an Introduction to Language Revitalization*. New York: Cambridge University Press.
- Grimes, B.F. (ed.) (1988). *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics, Inc.
- Hinton, L., Huss, L. M., & Roche, G. (Eds.). (2018). *The Routledge handbook of language revitalization* (p. 1). New York: Routledge.
- Ibda, H. (2017). Urgensi pemertahanan bahasa ibu di sekolah dasar. SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i2.980>.
- Ibrahim, G. A. (2011). Bahasa terancam punah: Fakta, sebab-musabab, gejala, dan strategi perawatannya. *Linguistik Indonesia*, 29(1), 35-52.
- Ibrahim, G.A. & Mayani, L.A. (2018). Perencanaan bahasa di Indonesia berbasis triglossia. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 107-116.
- Johnson, A. (2009). The rise of English: The language of globalization in China and the European Union. *Macalester International*, 22, 131-168.
- Joshua A. Fishman (ed.), *Can threatened languages be saved? Reversing language shift, revisited: A 21st century perspective*. Clevedon: Multilingual Matters, 2001. Pp. xvi, 503
- Kaplan, R. B. and R. B. Baldauf 1997. *Language Planning from Practice to Theory*. Clevedon: Multilingual Matters
- Krauss, M. E. (1992). The world's languages in crisis. *Language*, 68, 4-10.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Martianto, D. A. (2002). *Pendidikan Karakter: Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

- Nazarudin. (2021). The Routledge Handbook of Language Revitalization. (Eds. Leanne Hinton, Leena Huss, Gerald Roche). Linguistik Indonesia, Februari 2021, 111-109 Volume ke-39, No.1.
- Onishi, N. (2010). As English spreads, Indonesians fear for their language. *The New York Times*, 25 July 2010.
- Purwaningsih, E. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa. *Masalah-Masalah Hukum*, 26(3).
- Riza, H. (2008). Resources report on languages of Indonesia. The 6th Workshop on Asian Language Resources.
- Romaine, S. (2006). Planning for the survival of linguistic diversity. *Language policy*, 5(4), 443-475.
- Sartini, N. W. (2014). Revitalisasi bahasa Indonesia dalam konteks kebahasaan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(4), 206-210. DOI <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.206-210>.
- Schmidt, U. (2008). Language loss and the ethnic identity of minorities. ECMI Brief #18 European Centre for Minority Issues (ECMI). Diunduh melalui [http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2009/2004/pdf/brief\\_18.pdf](http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2009/2004/pdf/brief_18.pdf).
- Sneddon, J. (2003). Diglossia in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 159(4), Leiden, 519-549.
- Steinhauer, H. (1994). The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and possibilities. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 150 Volumes of *Bijdragen; A Backward Glimpse and a Forward Glimpse* 150(4). Leiden, 755- 784.
- Sudipa, I Nengah. (2009). "Psycholinguistics : An Introductory Note." Essay Majalah, volume 16. English Department, Udayana University.
- Tondo, H. (2009). Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah: Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 11(2). DOI DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v11i2.245>.
- The Jakarta Post*. Local languages at risk of dying out. Saturday, 15 December 2011.

The codification of native Papuan languages. *Journal of Arts and Humanities (JAH)* Warami et al., JAH (2020), Vol. 09, No. 10: 40-48.

Urip, R. (2015). Choose to speak English at home: A case study of family language policy of three native Indonesian bilingual families. Unpublished Master's thesis. Atma Jaya Catholic University of Indonesia.

## **Media Masa Daring**

Salafudin, I. (2021, 20 November). 11 Bahasa Daerah di Indonesia Dinyatakan Punah. Unesco Mencatat Tiap Pekan Satu Bahasa Daerah Hilang. *Surat Kabar Daring Suara Merdeka Solo*. Diakses melalui <https://solo.suaramerdeka.com/nasional/pr-051734165/11>.

Sinuhaji, J. (2021, 22 Februari). Resmi Diakui UNESCO, Hampir 2.500 Bahasa di Ambang Kepunahan karena Penutur Sangat Sedikit. *Surat Kabar Daring Pikiran Rakyat*. Diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011475770/>

(<http://scodis.com/for-students/linguarium/language-situation-in-the-world/>).

(<https://www.theatlantic.com/national/archive/2009/11/whats-lost-when-a-language-dies/29886/>).







Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi